ANALISIS PENINGKATAN AKSES PENDANAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK PETANI DI NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG (KABUPATEN DHARMASRAYA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Program S1 Perbankan Syariah

Disusun oleh:

DELLA

3319.239

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2023/1443 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/Nim	: DELLA
NIM	: 3319239
Tempat / Tanggal Lahir	: Koto Padang, 20 Maret 2001
Fakultas / Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:Analisis Peningkatan Akses Pendanaan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Petani Di Nagari Empat Koto Pulau Punjung (Kabupaten Dharmasraya)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila terdapat dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, Maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2023
Penulis,

DELLA
NIM 3319239

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama DELLA nim: 3319239, dengan judul **"Analisis Peningkatan Akses Pendanaan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Petani Di Nagari Empat Koto Pulau Punjung (Kabupaten Dharmasraya)".** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah untuk mendapatkan gelar S1.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 13 Juli 2023

Pembimbing

Yuwarman Mansur,.SE,.MM

NIP. 196203111993031002

Abstrak

Skripsi ini berjudul "**Analisis Peningkatan Akses Penadanaan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Petani Di Nagari Empat Koto Pulau Punjung (Kabupaten Dharmasraya)**" yang ditulis oleh DELLA NIM. 3319239. Program Studi Hukum S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 2023 M/ 1444 H.

Penelitian ini latar belakangi karena kurangnya akses pendanaan atau pembiayaan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah untuk petani sawit dan karet di Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Masyarakat petani masih belum bisa dibilang sejahterah salah satu faktornya adalah kurangnya akses permodalan untuk usaha pertanian dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta kurangnya pengetahuan petani terhadap lembaga keuangan syariah. Penyaluran kredit masih sedikit pada sektor pertanian dikarenakan beberapa permasalahan salah satunya pendapatan petani yang tidak menentu dan bisa menyebabkan kemacetan kredit apabila terjadi gagal panen atau factor cuaca dan tidak adanya agunan yg jelas dimiliki dari itu peran perbankan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian petani dan petani bisa lebih mengekspos usaha nya dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis peningkatan akses pendanaan untuk petani di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Dharmasraya pada lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif , sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Peran dari lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses pendanaan atau pembiayaan pada sektor pertanian khusunya pada petani karet dan sawit di kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Karena di Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung masyarakat pada umumnya sebagai petani sawit dan karet. Masalah utama yang dihadapi masyarakat petani sawit dan karet adalah kurang permodalan dalam usaha petani dan pelaku usaha perbankan pendukung pembiayaan petani Dan penyaluran kredit masih sedikit pada sektor pertanian dikarenakan beberapa permasalahan salah satunya pendapatan petani yang tidak menentu dan bisa menyebabkan kemacetan kredit apabila terjadi gagal panen atau factor cuaca dan tidak adanya agunan yg jelas dimiliki. Peran dari perbankan syariah adalah dengan meningkatkan akses pendanaan dan kepercayaannya pada petani agar petani bisa lebih maju dan berkembang melalui usaha yang di lakukannya.

Kata kunci: akses pendanaan, pertanian, peran lembaga keuangan syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Peningkatan Akses Pendanaan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Petani Di Nagari Empat Koto Pulau Punjung (Kabupaten Dharmasraya)**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam kesempatan ini penghargaan dan cinta kasih yang sangat besar penulis persembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta, terimakasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan dan pengorbanan untuk menghidupi buah hatinya selama ini, Ayahanda **SUHAT** dan Ibunda **ASMA** yang kasih sayang Ayah dan Ibu melebihi apapun dan tidak akan pernah bisa penulis balas. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada Kakak-kakakku tersayang **Riki Oktacan, Ike Puspita, Hendro Kartiko, Nensi, Bima arafa**.beserta keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis sampai pada titik sekarang ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah ikut support memberikan semangat yang luar biasa demi selesainya penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai tantangan dan ujian, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan juga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. **Dr.Hesi Eka Putri, S.E.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
3. **Baginda Parsaulian, S.E., M.E** sebagai Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. **Zuwardi,.MA** selaku dosen pembimbing akademik yang selalu mengarahkan, membimbing, mengajarkan, dan mempermudah urusan penulis dalam bidang Akademik.

5. **Yuwarman Mansur, S.E., MM** sebagai pembimbing skripsi. Terimakasih atas waktu, tenaga, ilmu, nasehat serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak/ Ibu Dosen dan staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak atau Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas berupa buku atau literatur dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat saya **Anggely Hertamina, Lisa Irma, Safria Fitri** yang memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada teman seperjuangan di local **PS-F** yang selalu bersama – sama memberikan motivasi dan semangat, Terima kasih atas kebersamaan yang sudah kita lewati 4 tahun terakhir ini.
10. Seluruh pihak yang membantu, yang tidak tersebut satu persatu oleh penulis, atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, Juli 2023

Penulis

DELLA

NIM. 3319239

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 11
E. Tujuan Penelitian 11
F. Manfaat Penelitian 11
G. Penjelasan Judul 12
H. Kajian Terdahulu 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akses (accessibility) 16
B. PenyaluranDana/Pembiayaan 16
C. Akses Pendanaan 21
D. Lembaga Keuangan Syariah 22
E. Konsep Pertanian 31
F. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan Ekonomi.....35
G. Perspektif Islam tentang Sektor Pertanian…….…...37
H. Perkebunan kelapa sawit……..39
I. Perkebunan Karet……..41
J. Peranan Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi……...41

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 43
C. Jenis dan Sumber Data 44
D. Teknik Pengumpulan Data..... 44
E. Informan Penelitian..... 44

F. Teknik Analisis Data..... 45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya 47

B. Gambaran Umum Kenagarian Empat Koto 51

C. Analisis Peningkatan Akses Pendanaan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Petani di Nagari Empat Koto Pulau Punjung..... 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 jumlah penduduk di kenagarian empat koto pulau punjung tahun 2018-2022.....4
Tabel 1.2 jumlah petani karet dan sawit pada kenagarian empat koto pulau punjung pada tahun 2018- 2022.....5
Tabel 1.3 perbandingan jumlah petani sawit dan karet dengan jumlah penduduk di tahun 2018-2022 pada kenagarian empat koto pulau punjung.....6
Tabel 1.4 jumlah dana kur pertanian yang di alokasi kan oleh bank bsi ke petani nagari empat koto.....6
Tabel 1.5 jumlah petani yang menerima dana kur pertanian di bank bsi.....7
Tabel 1.6 rata-rata jumlah petani nagari empat koto yang menerima dana kur pertanian di bank bsi kcp pulau punjung tahun 2018-2022.....8
Tabel 1.7 luas lahan pertanian sawit dan karet nagari empat koto tahun 2018-2022.....9
Tabel 4.1 luas wilayah kecamatan, jumlah nagari dan jorong di kabupaten dharmasraya tahun 2022.....51
Tabel 4.2 jumlah penduduk di kenagarian empat koto pulau punjung tahun 2018-2022.....60
Tabel 4.3 jumlah petani karet dan sawit pada kenagarian empat koto pulau punjung pada tahun 2018- 2022.....61
Tabel 4.4 perbandingan jumlah petani sawit dan karet dengan jumlah penduduk di tahun 2018-2022 pada kenagarian empat koto pulau punjung.....62
Tabel 4.5 jumlah dana kur pertanian yang di alokasi kan oleh bank bsi ke petani nagari empat koto.....63
Tabel 4.6 jumlah petani yang menerima dana kur pertanian di bank bsi 64
Tabel 4.7 rata-rata jumlah petani nagari empat koto yang menerima dana kur pertanian di bank bsi kcp pulau punjung tahun 2018-2022.....64
Tabel 4.8 luas lahan pertanian sawit dan karet nagari empat koto tahun 2018-2022.....65
Tabel 4.9 rata-rata kebutuhan dana untuk usaha pertanian (karet dan sawit) di nagari empat koto pulau punjung kabupaten dharmasraya.....67
Tabel 4.10 kebutuhan dana untuk usaha pertanian di nagari empat koto pulau punjung kabupaten dharmasraya tahun 2018-2022.....67

Tabel 4.11 kekurangan dan kelebihan dana untuk usaha pertanian (karet dan sawit)
di kenagarian empat koto pulau punjung kabupaten dharmasraya.....68
Tabel 4.12 Kebutuhan dana untuk usaha pertanian (karet dan sawit) di kenagarian
empat koto pulau punjung kabupaten dharmasraya.....69
Tabel 4.13 prediksi kebutuhan dana untuk usaha pertanian (karet dan sawit)
di kenagarian tahun 2023-2017.....69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah tentu tidak lepas dari pembiayaan atau pendanaan dalam menopang perekonomian terutama pada peningkatan pembiayaan di sektor pertanian yang saat ini belum diikuti oleh pemahaman serta pegetahuan para petani terhadap sistem operasional lembaga keuangan syariah, mekanisme dan cara mengakses skim-skim pembiayaan untuk pertanian pada lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat aksesbilitas petani dalam memperoleh usaha taninya.

Peran Pertanian dalam perkembangan ekonomi Hanya dipandang pasif sebagai unsur Penunjang. Peran utama pertanian hanya Di anggap sebagai sumber tenaga kerja Dan dan sektor penghasil bahan-bahan Pangan. Adapun peran sektor pertanian Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia yaitu:

1. Sebagai sektor penghasil bahan Pangan
2. Sebagai sumber tenaga kerja bagi Sektor ekonomi lain
3. Sebagai salah satu penghasil Sumber devisa bagi negara
4. Meningkatkan permintaan akan Produk industri dan dengan demikian Mendorong keharusan diperluasnya Sektor sekunder dan tersier. [1]

sektor pertanian ini masih dihadapkan pada berbagai masalah atau kendala. Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang low-educated. Kebanyakan petani tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi sehingga pengelolaan pertanian tidak berjalan optimal. Kedua, pertanian merupakan sektor yang dianggap sangat berisiko untuk dijadikan lahan investasi. Ancaman gagal panen, serangan hama, kekeringan, dan

[1] Mi'Rojun Nurun Nadziroh, "*Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan*",Jurnal Ekonomi, Vol 2 No. 1 (Mei 2020)

fluktuasi harga yang tajam sering mengganggu investor untuk menanamkan modalnya di sektor ini. Ketiga, keterbatasan dana atau modal petani. Masalah permodalan ini karena akses pembiayaan yang tidak dimiliki petani yang disebabkan ketidak mampuannya menyediakan agunan, terbatasnya jumlah dan jangkauan operasi bank sementara para petani rata-rata hidup di pedesaan, kondisi pertanian yang besifat long-term (jangka panjang), sementara perbankan menghadapi kebutuhan short term(jangka pendek) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Akumulasi dari permasalahan tersebut menyebabkan jumlah kredit yang disalurkan ke sektor pertanian masih sangat rendah.

Minimnya ketersediaan kredit untuk sektor pertanian ini juga dipengaruhi oleh karakteristik sektor pertanian yang dianggap memiliki risiko yang sangat besar (high risk industry). Selain itu, mayoritas kredit yang dikucurkan untuk sektor pertanian juga berasal dari pembiayaan konvensional dan berbasis bunga. Sistem pembiayaan tersebut jika ditinjau lebih lanjut ternyata memiliki dampak yang buruk bagi petani.

Bunga sangat memberatkan petani, karena untuk menghasilkan profit saja petani harus bersusah payah, apalagi jika harus dibebani bunga. Pemberlakuan sistem bunga dalam skim pembiayaan atau kredit oleh bank konvensional sangat kontraproduktif dengan sektor pertanian. Bahkan beberapa program pemerintah yang berkaitan dengan pembiayaan untuk sektor pertanian juga tidak luput dari sistem bunga. Oleh karena itu, tingkat suku bunga yang sedemikian tinggi akan membuat iklim usaha pertanian semakin sulit, karena pelaku usaha tani harus menyediakan dana setiap bulannya untuk membayar bunga kepada bank, sementara sebagian besar perhitungan keuntungan dalam usaha tani dilakukan setelah masa panen.

Kondisi usaha sektor pertanian akan semakin hancur dengan sistem bunga ini, ketika bunga harus tetap dibayarkan walaupun usaha pertanian dalam kondisi merugi.[2]

Masyarakat kabupaten Dharmasraya di kecamatan pulau punjung khususnya pada kenagarian Empat koto pulau Punjung sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan ada juga berternak, berdagang dan lainnya. Akan tetapi mayoritasnya bertani baik itu mengelolah kebun karet dan kebun kelapa sawit. Di kenagarian Empat Koto perekonomian masyarakat petani masih belum bisa dibilang sejahterah salah satu faktornya adalah kurangnya akses permodalan untuk usaha pertanian dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta kurangnya pengetahuan petani terhadap lembaga keuangan syariah.

Pada saat ini permasalahan utama yang di hadapi masyarakat yaitu kurang permodalan dalam usaha petani dan pelaku usaha perbankan pendukung pembiayaan petani dan masyarakat petani lebih bnyak memilih melakukan pembiayaan pada bank konvensional dari pada perbankan syariah. Dan penyaluran kredit masih sedikit pada sektor pertanian dikarenakan beberapa permasalahan salah satunya pendapatan petani yang tidak menentu dan bisa menyebabkan kemacetan kredit apabila terjadi gagal panen atau factor cuaca dan tidak adanya agunan yg jelas dimiliki oleh petani dan lainnya. Jumlah penduduk di kenagarian empat koto pulau punjung sekarang hampir mencapai 10.742 jiwa dengan luas nagari 37,59 km2 yang terbagi dalam 12 jorong.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Di Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Tahun 2018-2022.

Tahun	Jumlah penduduk	Kenaikan / penurunan

[2] Junia Farma,"*prospek Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian",Jurnal Ekonomi*, Vol.5, No.2 (Oktober 2018)

		∑	%
2018	10.444	-	-
2019	10.592	148	(1,41)
2020	10.688	96	0,90
2021	10.628	(60)	(0,56)
2022	10.742	114	1,07

Sumber: arsip dokumen di nagari empat koto

Dari tabel diatas jumlah kepadatan penduduk mencapai 10.742 jiwa pada tahun 2022 dari 12 jorong di kenagarian empat koto pulau punjung. pada tahun 2018 jumlah penduduk kenagarian empat koto pulau punjung berjumlah 10.444 penduduk, pada tahun 2019 jumlah penduduk 10.592 mengalami kenaikan 1,42% yaitu 141 jiwa, tahun 2020 berjumlah 10.688 mengalami penurunan sebanyak 0,90% atau 96 penduduk dari tahun sebelumnya, tahun 2021 berjumlah 10.628 mengalami penurunan lagi 0,56% yaitu 60 jiwa, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan 1,07% yaitu 114 jiwa.

Tabel 1.2

Jumlah Petani Karet Dan Sawit Pada Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Pada Tahun 2018- 2022

Tahun	**Jumlah Petani Sawit dan Karet**	**Kenaikan / Penurunan**	
		∑	**%**

2018	3.770	-	-
2019	3.816	46	1,22
2020	3.874	58	1,51
2021	3.926	52	1,34
2022	3.990	64	1,63
Rata-rata Pertumbuhan pertahun			1,43 %

Sumber: Arsip dokumen nagari empat koto

Dari tabel diatas bisa dilihat jumlah petani sawit dan karet di kenagarian empat koto pulau punjung mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. tahun 2018 petani sawit dan karet berjumlah 3.770 petani, pada tahun 2019 petani sawit dan karet mengalami peningkatan 1,22% yaitu 46 petani, tahun 2020 meningkat 1,51% yaitu 58 petani, tahun 2021 petani sawit dan karet menurun menjadi 1,34% yaitu 52 petani, pada tahun 2022 petani sawit dan karet meningkat 1,63% yaitu 64 petani. Rata pertumbuhan jumlah petani sawit dan karet adalah 1,43 % pertahun.

Tabel 1.3

Perbandingan Jumlah Petani Sawit Dan Karet Dengan Jumlah Penduduk Di Tahun 2018-2022 Pada Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung.

Tahun	**Jumlah petani sawit dan karet**	**Jumlah Penduduk**	**%**
2018	3.770	10.444	36,09

2019	3.816	10.592	36,02
2020	3.874	10.688	36,24
2021	3.926	10.628	36,94
2022	3.990	10.742	37,14

Sumber: arsip dokumen nagari empat koto

Tabel diatas adalah persen perbandingan jumlah petani sawit dan karet dengan jumlah penduduk dari tahun 2018-2022. Tahun 2019 yaitu 36,09%, tahun 2019 perbandingan 36,02%, tahun 2020 yaitu 36,24%, pada tahun 2021 yaitu sebanyak 36,94% dan pada tahun 2022 perbandingan sebesar 37,17%

Tabel 1.4

jumlah dana KUR Pertanian yang di alokasi kan oleh Bank BSI ke petani Nagari Empat Koto

Tahun	Jumlah Dana	Naik /Turun	
		∑	%
2028	(x)		
2019	(x)		
2020	(x)		
2021	3.675,000,000		
2022	4.330,000,000	655.000,000	17,82

Sumber: PT Bank Bsi Kcp Pulau Punjung

(x) data belum tersedia

Bank bsi kcp pulau punjung mulai beroperasi atau berdiri pada februari tahun 2021,maka dari penulis hanya meneliti dari tahun 2021 hingga 2022, bisa dilihat dari tabel diatas dana yang dikucurkan bank BSI pada tahun 2021 sebesar 3.675,000,000 dan pada tahun 2022 sebesar 4.330,000,000 pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah dana untuk petani karet dan sawit di nagari empat koto pulau punjung sebanyak 655.000,000 atau skitar 17,82%, di BSI tersebut terdapat pembiyaan KUR yang memang di sediakan khusus untuk petani menengah kebawah yang pembiayaan nya mulai dari 10 juta hingga 500 juta, itupun tergantung dengan pendapat nasabah dan usaha yang di jalani nasabah dan juga agunan yang di berikan nasabah kepada pihak bank,jika usaha dan jaminannya memadai maka pihak bank akan memberikan pembiayaan lebih tinggi tetapi jika tidak maka pihak bank akan memberi sesuai dengan kemampuan atau pendapat yang di miliki nasabah tersebut.

Tabel 1.5

Jumlah Petani yang menerima Dana KUR Pertanian di Bank BSI

Tahun	**Jumlah Petani**	**Kenaikan /Penurunan**	
		∑	**%**
2018	(x)		
2019	(x)		
2020	(x)		
2021	68		
2022	85	17	0,25%

Sumber data: PT Bank BSI kcp Pulau Punjung

(x) data belum tersedia

Jumlah petani sawit dan karet yang menerima dana dari Bank BSI juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 sebanyak 17 orang.

Tabel 1.6

Rata-rata jumlah Petani Nagari Empat koto yang menerima dana KUR Pertanian di Bank BSI Kcp Pulau Punjung Tahun 2018-2022

Tahun	Dana	Petani	Rata-rata
2018	(x)	(x)	
2019	(x)	(x)	
2020	(x)	(x)	
2021	3.675,000,000	68	54.044.117,65
2022	4.330,000,000	85	50.941,176,47

Sumber data: PT Bank BSI kcp Pulau Punjung (x)
sumber data belum tersedia

Dari tabel diatas maka diketahui jumlah rata-rata petani yang menerima dana KUR adalah pada tahun 2021 sebanyak 68 dana rata-rata yang di alokasikan ke petani 54.044.117,65 kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 17 orang jadi petani yang menerima dana KUR di BSI menjadi 85 orang petani dan rata-rata dana yang di alokasikan ke petani menurun dari tahun sebelum nya yaitu pada tahun 2022 sebesar 50.941,176,47 per petani.

Tabel 1.7

Luas Lahan Pertanian Sawit Dan Karet Nagari Empat Koto Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Lahan Sawit	Luas Lahan Karet
2018	561,5 ha	701,01 ha

2019	570,83 ha	742,00 ha
2020	590,83 ha	773,00 ha
2021	600,83 ha	801,00 ha
2022	608,66 ha	821, 00 ha

Sumber data: Bps Kabupaten Dharmasraya tahun 2022

Dari tabel di atas bisa kita lihat luas perkebunan karet dan sawit dari tahun 2018 sampai dengan 2022,pada tahun 2018 luas perkebunan karet adalah 701,01 ha,dan luas perkebunan sawit 561,5 ha, pada tahun 2019 luas perkebunan karet bertambah 9,33 ha, luas perkebunan sawit bertambah 9,33 ha, pada tahun 2020 luas kebun karet bertambah 31 ha, kebun sawit bertambah 20 ha, tahun 2021 kebun karet bertambah 28 ha dan kebun sawit bertambah 10 ha, dan terkahir pada tahun 2022 luas kebun karet bertambah 20 ha jadi luasnya 821,00 ha, dan kebun sawit bertambah 7,83 ha jadi luasnya 608,66 ha.

Di kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terdapat satu Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang letaknya cukup strategis di jalan lintas sumatera di samping Rsud Pulau punjung Kabupaten Dharmasraya. setelah saya melakukan observasi awal pada lembaga keungan syariah yaitu Bank Syariah Indonesia Kcp Pulau Punjung dan pada masyarakat Nagari Empat Koto Mengenai Peningkatan Akses Pendanaan Lembaga Keuangan Syariah Di Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat di identifikasi masalah yaitu:

1. Terjadinya kenaikan jumlah profesi pertani yang semakin berkurang di nagari Empat Koto pulau Punjung pada tahun 2021 .

2. Kurangnya akses pendanaan untuk petani sawit dan karet di nagari empat koto pulau punjung.
3. Kurangnya kepercayaan lembaga keuangan syariah pada masyarakat petani disebabkan karena masalah agunan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dilaksanakan lebih fokus,sempurna dan mendalam maka penulis membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pembahasan akses pendanaan lembaga keuangan syariah yaitu dari para petani sawit dan karet yang melakukan pembiayaan pada bank BSI KCP Pulau punjung.
2. Pembahasan sektor pertanian pada penelitian ini mencangkup sub sektor perkebunan yaitu karet dan sawit.
3. Petani-petani yang di teliti adalah petani yang yang melakukan pembiayaan pada bank BSI KCP Pulau Punjung yang berada di kenagarian empat koto pulau punjung.

D. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Analisis peningkatan akses pendanaan lembaga keuangan syariah untuk petani di Nagari empat koto?
2. Apa kendala akses pendanaan lembaga keuangan syariah untuk petani di Nagari empat koto?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka Tujuan penelitian adalah :

1. bagaimana meningkatkan akses pendanaan lembaga keuangan syariah pada masyarakat khususnya petani sawit dan karet di kenagarian empat koto pulau punjung.
2. apa kendala peningkatan akses pendanaan lembaga keuangan syariah pada lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat khususnya petani sawit dan karet di kenagarian empat koto pulau punjung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan**.** Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut**:**

1. Diperolehnya data dan informasi tentang akses pendanaan lembaga keuangan syariah.
2. Diperoleh nya data dan informasi tentang peyebab tekendalanya akses pendanaan lembaga keuangan syariah.

G. Penjelasan Judul

Akses (accessibility) aksesibilitas adalah istilah umum yang digunakan menggambarkan sejauh mana produk, perangkat, layanan atau lingkungan yang tersedia untuk orang sebanyak mungkin. Aksesibilitas juga dapat dilihat sebagai “kemampuan untuk

	mengakses".[3]
Pendanaan Syariah	pendanaan syariah adalah pembiayaan yang sifatnya syariah yang memang disediakan untuk bisa dijadikan alat bantu dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan. Kegiatannya meliputi penyediaan barang dan uang dari pihak bank dengan dasar kesepakatan antara nasabah yang dibiayai dengan pihak bank.
Akses Pendanaan	Akses pendanaan atau pembiayaan merupakan kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut
Lembaga keuangan syariah	Lembaga Keuangan Syariah adalah

[3] Anita dkk,"*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum Syariah (Studi di Kecamatan Pamijahan Bogor, Kabupaten Bogor)*," Jurnal ekonomi, Vol.1, No.1 (Oktober 2021)

	sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam.
Petani	orang yang pekerjaanya bercocok tanam pada tanah pertanian.

H. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, maka penulis terlebih dahulu mengamati dan mencermati penelitian terlebih dahulu yang relavan, dari penelusuran yang dilakukan penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan judul dan masalah yang akan diteliti diantaranya:

1. Jurnal Qurrotul Aidah, Yuli Dwi Yusrani Anugrah (2021) yang berjudul **"Pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian"** dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bank peranan bank syariah sangat penting untuk usaha pertanian.
2. Jurnal Mhd. Asaad (2011) yang berjudul **" Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian"**, dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bank peranan bank syariah untuk usaha pertanian dapat di tingkatkan dengan menggunakan strategi:

   (1) mengembangkan kantor bank syariah pada daerah pertanian.

   (2) memberikan pembiayaan syariah yang lebih besar kepada usaha pertanian.

(3) melakukan pemasaran produk pembiayaan bank syariah kepada usaha pertanian.

(4) memberikan pembiayaan bank syraiah yang sesuai dengan usaha pertanian secara penuh, agar potensi kegagalan panen dapat di minimalisir.

3. Jurnal Akhmad Sobrun Jamil (2018) yang berjudul **" Pembiayan Sektor Pertanian Oleh Bank Syariah Untuk Meningkatkan Nilai Tukar Petani Di Provinsi Jawa Timur"**, dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pembiayaan perbankan syariah sangat berpengaruh terhadap peningkatan sektor pertanian.
4. Jurnal Risa Ratna Gumilang (2013) yang berjudul **"Model Pembiayann Syariah Bank Muamalat Untuk Sektor Pertanian"** dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian memiliki peran pembangunan internasional yang sangat strategis. Salah saru masalah utama dalam pembangunan usaha pertanian adalah kelemahan dukungan modal. Bank muamalat syariah, memiliki potensi yang sangat signifikan untuk pembiayaan pertanian karena inti bisnis sebagai lembaga intermediasi keuangan.
5. Jurnal Purwanto (2017) yang berjudul **" Kontribusi Pembiayaan Sektor Pertanian Bank Syariah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Pulau Sumatera Periode 2016-2017"** dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa beroperasinya sistem perbankan syraih di Indobesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat tidak terkecuali para petani di Sumatra. Pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan perbankan syariah di Sumatra dua tahun terkhir (2016-2017) selalu

mengalami peningkatan. Adanya pembiayaan yang disalurkan pada sektor pertanian maka dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

6. Jurnal Budi Yoko , Adistiar Prayoga (2019) yang berjudul **"Akses Dan Presepsi Pembiayaan Pertanian Mikro Syariah : Studi Di Kabupaten Lampung Tengah"** dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan Petani menilai keberadaan BMT berperan dalam mendukung kegiatan usaha tani padi ataupun aktivitas perekonomian lainnya. Dari sisi pelayanan karyawan, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta produk pembiayaan pertanian dari BMT, petani menilai hal tersebut sudah cukup baik. Petani contoh menyatakan setuju terhadap masing-masing atribut persepsi dengan persentase yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akses (accessibility)

Akses (accessibility) didefinisikan sebagai tingkat kemampuan untuk mencapai atau mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Menurut Parkesit, akses adalah tingkat kesulitan atau kemudahan penduduk untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Menurut Peluso dan Ribo akses sebagai kemampuan menghasilkan keuntungan dari sesuatu termasuk diantaranya objek material, perorangan, institusi dan simbol dengan memfokuskan pada kemampuan dibandingkan dengan kepemilikan yang ada dalam teori properti, formulasi ini memberikan perhatian pada wilayah yang lebih luas pada hubungan social yang mendesak dan memungkinkan orang untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya tanpa memfokuskan diri pada hubungan property semata. Singkatnya, aksesibilitas adalah istilah umum yang digunakan menggambarkan sejauh mana produk, perangkat, layanan atau lingkungan yang tersedia untuk orang sebanyak mungkin. Aksesibilitas juga dapat dilihat sebagai "kemampuan untuk mengakses".[4]

B. Penyaluran Dana/pembiayaan

1. Defenisi Pembiayaan

Pembiayaan atau financing yait pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung invetasi yang telah dirancanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung invetasi yang telah dirancanakan. Pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga Islam, penempatan,

[4] Anita dkk*,"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum Syariah (Studi di Kecamatan Pamijahan Bogor, Kabupaten Bogor),"* Jurnal ekonomi, Vol.1, No.1 (Oktober 2021)

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah.[5] Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

a) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
b) Transaksi jual beli dalam benuk piutang murabahah, salam, dan istisna'.
c) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
d) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengmbalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, tau bagi hasil.[6]

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, diantaranya:

a) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk mengembangkan usaha, baik usaha bersifat produksi, perniagaan, maupun dalam bentuk investasi. Dimana yang memanfaatkannya dapat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan.
b) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, sewaktu-waktu bisa habis kapan saja. Dimana kebutuhan ini seperti kebutuhan pokok yang tidak dapat menghasilkan sesuatu

[5] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 68

[6] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 40-41

yang menguntungkan pihak yang memanfaatkan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

1) Pembiayaan modal kerja Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) atau secara kualitatif (mutu hasil produksi), keperluan perdagangan atau peningkatan kedudukan dari suatu barang. Misalnya menambah jumlah produksi yang akan dijual, menciptakan kualiatas barang yang akan diperdagangkan.
2) Pembiayaan investasi Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan itu.Dari pembiayaan tersebut digunakan agar dana menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, seperti halnya menambah menanam modal dalam mencari keuntungan.[7]

3. Dasar Hukum Pembiayaan

Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: **"***Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadam"*. [Q.S.An-Nisa (4): 29].

Jika pembiayaan menguntungkan bagi orang banyak (peminjam), sedangkan pihak yang memberikan pembiayaan akan mendapatkan margin atau keuntungan dari pembiayaan dari pembiayaan yang diberikan oleh nasabah. Pada intinya

[7] Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 155

pembiayaan menciptakan kehidupan saling tolong-menolong kepada sesama umat manusia, baik yang kehidupan kurang beruntung, atau sedang dalam kesusahan dalam mencari pinjaman.

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1. Tujuan Pembiayaan

Pencapaian bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya dalam mendapatkan sumber dana dalam pembiayaan, ada beberapa tujuan pembiayaan pada perbankan syariah diantaranya:

a) Pemilik

Bagi yang memiliki diharapkan akan memperoleh hasil, atau dari sumber pendapatan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian akan menuai hasil investasi yang sudah disimpan sejak lama pada lembaga keuangan tersebut.

1) Pegawai

Bagi pegawai yang mengelola lembaga keuangan tersebut mendapatkan kesejahteraan, dan menambah lading kebaikan dalam melayani pembiayaan selama masih bekerja dilembaga keuangan tersebut.

2) Masyarakat

a) Pemilik dana

b) Debitur yang bersangkutan

c) Masyarakat umumnya konsumen[8]

3) Pemerintah

Dampak dari penyediaan pembiayaan pemerintah membantu dengan adanya pembiayaan, dapat mengakomodir pembangunan perekonomian

[8] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 302

Negara, disamping produk pembiayaan masih banyak yang berupa pengenaan pajak didalam produk tertentu di dalam lembaga keuangan. Pada akhirnya apabila produk yang dikenai pajak itu akan menambah pendapatan Negara.

4) Lembaga keuangan

Bagi lembaga yang bersangkutan, dari hasil pembiayaan yang disalurkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya, serta tetap kompeten dan menjaga integritas lembaga. Selain itu, dalam upaya meningkatkan jumlah masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan supaya menjaga tutur kata yang baik, dan melayani dengan ramah itu merupakan modal awal dalam menciptakan kepuasan terhadap pelayanan.

2. Fungsi Pembiayaan

Fungsi Pembiayaan Lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiyaan kepada masyarakat mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a) Meningkatkan daya guna uang.
b) Meningkatkan daya guna barang.
c) Meningkatkan peredaran uang.
d) Menimbulkan kegairahan berusaha.
e) Stabilitas ekonomi.
f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

5. Strategi Pembiayaan

1. Alokasi

pembiayaan penempatan atau pemilihan alokasi pembiayaan meliputi segmensi nasabah, lokasi, dan besaran plafon terhadap masing-masing

nasabah, di mana digunakan untuk menimbulkan risiko yang timbul dari pembiyaan.[9]

2. Penentuan harga variatif

penentuan harga (untuk memberikan kompetisi) di daerah daerah tertentu yang berdasarkan pada kondisi masing-masing daerah.

C. Akses pendanaan

Akses pendanaan atau pembiayaan merupakan kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Untuk berinovasi dan berhasil dinegara berkembang. Dibutuhkan akses kepada modal yang cukup. Aktivitas pembiayaan melibatkan kewajiban dan ekuitas yang mencakup perolehan laba dan peminjaman uang dari kreditur serta membayar uang yang dipinjam dan dalam pemberian pembiayaan.

jenis pembiayaan diantaranya, pembiayaan modal kerja,pembiayaan investasi,dan pembiayaan konsumtif, serta dalam pembiayaan tersebut terdapat unsur-unsur yang meliputi, kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Biasanya pihak kreditur akan mengevaluasi calon nasabah berdasarkan *character, capacity, capital, collateral, condition.*

D. Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba atau unsur yang dilarang dalam agama islam. Peran lembaga

[9] Muhammad (ed), Bank Syariah: *Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisi, 2006), hlm. 1

keuangan syariah saat ini semakin dibutuhkan untuk kegiatan untuk kegiatan menabung, pembiayaan, investasi, asuransi dan lain-lain. Lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam sistem keuangan ekonomi modern untuk melayani masyarakat. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan syariah di indonesia:

1. Bank syariah

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiaayaan rakyat syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.[10]

Berdasarkan sumber dari Bank Indonesia, pengembangan perbankan syariah secara internasional dimulai pada 1890, yaitu keberadaan The Barclays Bank yang membuka cabang di Kairo Mesir dan pertama kali mendapat kritik tentang bunga bank. Pada 1900-1930 mulai tersebar adanya pemahaman bahwa bunga bank adalah riba. Pada 1930-1950, pertama kalinya ekonomi Islam memberikan alternatif aktivitas partnership yang sesuai dengan syariah. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983.

[10] Asnaini, Herlina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar : 2017), hal.1.

Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Secara intensif, berbagai upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (PAKTO), yang mengatur tentang deregulasi yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama saat itu telah berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Pada 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil"pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dan lain-lain.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) dan UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap

yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp201,397 triliun, Rp85,410 triliun dan Rp110,509 triliun.3 Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang di-launching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi insiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan

2. Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min yang berasal dari kata amana yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Dari kata amana di atas yang merupakan kata dasar at-ta'min muncul kata-kata lain yang secara artinya memiliki, kemiripan yaitu:[11]

a) aman dari rasa takut
b) amanah lawan kata dari khianat iman lawan dari kekufuran
c) memberi rasa aman

Arti yang terakhir yang paling dekat untuk menerjemahkan at-ta'min, yaitu: Men-ta'min-kan sesuatu, artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk

[11] Ibid, h. 40.

mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Landasan hukum asuransi syariah Landasan asuransi yang dipakai asuransi syariah terdiri dari dua landasan, yaitu landasan syariah dan landasan yuridis (hukum) sebagaimana berikut ini:

a) Landasan Syariah Di dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi syariah, tetapi terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi syariah. Yaitu :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ .. الْعِقَابِ

"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. al-Maidah:2).

b) Landasan Yuridis

Peraturan tentang asuransi syariah masih menginduk ke peraturan perundang-undangan tentang perasuransian secara umum di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab UndangUndang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Adapun peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang asuransi syariah baru pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/ LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

3. Penggadaian Syariah

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Gadai dalam fiqh disebut Ar-Rahn, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.[12]

4. Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan meliputi:

a) Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
b) Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Kegiatan usaha ini juga berlaku atas perusahaan pembiayaan syariah, hanya saja dalam melakukan kegiatannya perusahaan pembiayaan syariah harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan perusahaan pembiayaan syariah harus

[12] Ibid, hal. 77.

sesuai dengan ajaran Islam (in complinace with syariah) yang bebas dari unsur riba, haram, dan gharar. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah harus diatur dalam peraturan yang jelas.[13]

5. Pasar Modal Syariah

UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal (UUPM), menyebutkan bahwa Pasar Modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti: surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Transaksi jual-beli efek pasar modal dilakukan di Bursa Efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berdasarkan UUPM, Efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap bentuk derivatif atas efek.

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM Pasar Modal Syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang

[13] Ibid , hal. 77.

muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.[14]

E. Konsep Pertanian

1. Pengertian Sektor Pertanian

Ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya manusia, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi hasil-hasil pertanian. Pertanian merupakan industri primer yang mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air, dan mineral, serta modal dalam berbagai bentuk, pengelolaan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang di perlukan oleh manusia.[15] Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 8 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pertanian pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kadaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.[16] Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan Sektor Pertanian adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan sumber daya hayati sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam untuk menghasilkan bahan pangan atau sumber energi dan untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional,

---

[14] Ibid, hal. 86.

[15] Julio P.D. Ratag, Gene H.M. Kapantow, Caroline B.D. Pakasi, "Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian di kabupaten minahasa selatan". *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298*, Volume IIX Nomor 2A, (Juli 2016), h. 2.

[16] Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Ayat 8.

peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dinobatkan sebagai "Sektor Unggulan" dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.[17]

Padahal proses pembangunan ekonomi merupakan salah satu kemampuan merumuskan batasan terus menerus atas peranan sektor pertanian. Melihat kondisi ekonomi dengan sektor pertanian yang cukup besar, maka strategi pembangunan ekonomi yang tepat yaitu dengan menduhulukan sektor pertanian tersebut. Sektor pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha atau sektor produksi ialah pertanian dalam arti luas. Di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas ini dipilah-pilah menjadi lima subsektor diantaranya :

1. Tanaman pangan.

   Tanaman pangan sering disebut subsektor pertanian rakyat yang mencakup komoditas bahan makanan seperti: padi, jagung, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayuran dan buah- buahan.

2. Perkebunan. dibedakan atas dua yaitu:
   a) Perkebunan rakyat yaitu perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat dalam skala kecil-kecilan dengan tekhnologi yang sederhana. Hasil tanamannya berupa: karet, kopral, teh, kopi, tembakau, cengkeh, kapas, coklat dan rempah-rempah.
   b) Perkebunan besar yaitu kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan yang berbadan hokum. Hasil tanamannya berupa: karet, teh, kopi,kelapa sawit, coklat, kina,tebu dan berbagai serat.

[17] Michael P. Todaro and Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 2* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), h. 2.

3. Kehutanan.

   Hasil hutan terdiri dari tiga kegiatan yaitu:

   a) Penebangan kayu menghasilkan kayu glondongan, kayu bakar, arang dan bambu.
   b) Hasil hutan lain menghasilkan rotan, getah kayu, kulit kayu serta akarakar dan umbi- umbian.

4. Peternakan.

   Subsektor ini meliputi produksi ternak-ternak besar dan kecil seperti: telur, susu segar, wool, dan hasil pemotongan hewan.

5. Perikanan.

   Subsektor ini meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut,perairan umum, kolam, tambak, sawah dan keramba.[18]

2. Tahap-tahap Pembangunan pertanian

Ada tiga tahap dalam pembangunan pertanian diantaranya:[19]

1. Tahap Pertanian Tradisional (Subsisten)

Dalam pertanian tradisional, produk dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman saja (biasanya jagung atau padi) yang menjadi sumber bahan makanan utama. Pada tahap ini, tingkat produksi dan produktivitasnya rendah karena hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana (teknologi yang dipakai rendah). Selain itu, penanaman atau penggunanaan modal juga hanya sedikit sekali, sedangkan tanah dan tenaga kerja kerja manusia merupakan faktor produksi yang dominan. Pertanian tradisional bersifat tidak menentu.

Keadaan ini bisa dibuktikan dengan kenyataan bahwa manusia seolah-olah hidup diatas tonggak. Pada daerah-daerah yang lahan pertaniannya sangat sempit dan

[18] Dumairy, *Perekonomian Indonesia,* (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 204-205.
[19] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi V* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2010), h. 407.

penanaman hanya tergantung pada curah hujan yang tak dipastikan, produk rata-rata akan menjadi sangat rendah dan dalam keadaan tahuntahun buruk, para petani dan keluarganya akan menghadapi bahaya kelaparan yang sangat mencekam. Bagi para petani usaha yang lebih penting adalah meningkatkan kegagalan panen (mempertahankan hidup), daripada usaha untuk memaksimalkan produk pertaniannya.[20]

2. Tahap menuju pertanian modern

Pada tahap ini penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi dimana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersial, tetapi penggunaan modal dan teknologi masih rendah. Upaya untuk mengenalkan tanaman perdagangan dalam pertanian tradisional seringkali gagal dalam membantu petani untuk meningkatkan tingkat kehidupannya. Menggantungkan diri pada tanaman perdagangan bagi para petani kecil lebih mengundang resiko daripada pertanian subsistem murni karena risiko fluktuasi harga menambah keadaan menjadi lebih tidak menentu.

Keberhasilan atau kegagalan dari setiap upaya untuk mentransformasikan pertanian tradisional tidah hanya tergantung pada keterampilan dan kemampuan para petani dalam meningkatkan produktivitasnya, tetapi juga tergantung pada kondisi-kondisi komersial dan kelembaan setempat.[21]

3. Pertanian Modern

Tahap ini menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh penggunaan modal dan teknologi yang tinggi pula. Pada tahap ini produk pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani keperluan komersial. Pertanian modern (spesialisasi) bisa berbeda-beda dalam ukuran dan fungsinya. Mulai

[20] *Ibid,* h. 408
[21] *Ibid,* h. 409.

dari jenis pertanian buah-buahan dan sayur sayuran yang ditanam secara intensif, sampai pada pertanian gandum dan jagung yang sangat besar seperti di Amerika Utara. Hampir semua menggunakan peralatan mekanis yang sangat hemat tenaga kerja, mulai dari jenis traktor yang paling besar dan mesin-mesin panen yang modern, sampai pada teknik-teknik penyemprotan udara yang memungkinkan satu keluarga bisa mengolah dan menanami beribu-ribu hektar tanah pertanian tanpa bantuan tenaga perorangan lainnya.[22]

F. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi

dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam 4 bentuk kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut :

1. Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan output di sektor pertanian, baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasokan makanan yang kontinu mengikuti pertumbuhan penduduk, maupun dari sisi penawaran sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industry manufaktur dan perdagangan.
2. Pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor ekonomi lainnya.
3. Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya.
4. Sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (suber devisa) baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian maupun dengan peningkatan

[22] *Ibid,* h. 410.

produksi pertanian maupun dengan peningkatan produksi pertanian dalam negeri menggantikan impor.[23]

Ukuran sektor pertanian menjadikan sektor ini mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan input, yaitu tenaga kerja, bagi sektor industri dan sektor-sektor modern lainnya. Sebagian besar (70 persen atau lebih) penduduk disektor pertanian merupakan sumber utama bagi kebutuhan tenaga kerja di sektor perkotaan. Sektor pertanian juga dapat digunakan sebagai sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal yang berasal dari tabungan yang diinvestasikan dan tabungan berasal dari pendapatan.

G. Perspektif Islam tentang Sektor Pertanian

Dalam Islam, kegiatan pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. Kegiatan ini merupakan di antara cara yang mudah bagi mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT di samping mendapat manfaat atau pendapatan yang halal daripada hasil jualan keluaran pertanian. Ulama berselisih pendapat mengenai usaha yang paling baik, adalah usaha daripada perniagaan, pertukangan ataupun pertanian. Menurut Imam An-Nawawi dalam Shahihnya, pekerjaan yang baik dan afdhal ialah pertanian. Inilah pendapat yang sahih kerana ia merupakan hasil tangannya sendiri dan ia juga memberi manfaat kepada diri sendiri, umat Islam dan kepada binatang. Di samping itu bidang pertanian juga membawa para petani kepada sifat tawakkal.29 Kepentingan bidang pertanian pada pandangan Islam dapat dilihat dari banyaknya ayat al-Qur‟an yang menyebutkan mengenai hasil tanaman dan buah-buahan. Terdapat pada al-Qur‟an Surah Al- An‟am[6] : 99

[23] Tulus T.H. Tambunan, "*Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting".* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 1997.

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًاۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

Artinya : "Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkaitangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tandatanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman." (Q.S Al- An"am ayat 99).[24]

Maksud ayat diatas bahwa dengan kepastian dalam keadaan diberkahi sebagai rezeki buat hamba-hamba Allah untuk menyuburkan dan sebagai pertolongan untuk semua makhluk dan rahmat dari Allah untuk mereka. Kegiatan pertanian dari aspek akidah dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah hal ini karena tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Melakukan usaha pertanian lebih membuatkan seseorang itu memahami hakikat sebenarnya yaitu tawakal kepada Allah dan beriman kepada kekusaanNya.[25]

Mengenai pengelolaan lahan yang sudah dimiliki, Syariah Islam mewajibkan para pemilik lahan, baik yang dimiliki dengan cara Ihya`ul Mawat, Tahjir, maupun yang dimiliki dengan cara lainnya, untuk mengelola tanah itu agar produktif. Artinya, kepemilikan identik dengan produktivitas. Prinsipnya, memiliki berarti berproduksi (man yamliku yuntiju). Jadi pengelolaan lahan adalah bagian integral dari

[24] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid* ., h. 140.
[25] *Ibid*, h. 2.

kepemilikan lahan itu sendiri.[26] Kebijakan pertanian ini secara garis besar ditempuh dengan dua metode yaitu :

1. Intensifikasi (at-ta‟miq), misalnya dengan menggunakan pembasmi hama kimiawi, teknologi pertanian modern, atau bibit unggul. Intensifikasi ini sepenuhnya akan dibantu oleh negara. Negara akan memberikan (bukan meminjamkan) hartanya kepada para petani yang tidak mampu agar petani mampu membeli segala sarana dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khathab yang memberikan sarana produksi pertanian kepada para petani Irak untuk mengelola tanah pertanian mereka.
2. Ekstensifikasi (at-tausi‟). Ini ditempuh antara lain dengan menerapkan Ihya`ul Mawat, Tahjir, dan Iqtha‟ (memberikan tanah milik negara). Negara juga akan mengambil alih secara paksa lahan-lahan pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun lalu memberikan kepada orang yang mampu mengelolanya Syaikh Abdurrahman Al-Maliki juga menegaskan, selain dengan intensifikasi dan ekstensikasi di atas, kebijakan pertanian juga harus bebas dari segala intervensi dan dominasi asing, khususnya dominasi negara-negara Barat yang imperialis.[27]

H. Perkebunan kelapa sawit

Komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan pesat, yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Pergantian minat membuka perkebunan karet ke perkebuunan sawit dilatarbelakangi suatu pertimbangan dari sektor perekonomian. Pengelolaan perkebunan karet, hasil panennya membutuhkan waktu yang sangat panjang, sementara perkebunan kelapa sawit

[26] *Ibid, h. 5*, mengutip (Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, h. 61).
[27] *Ibid, h.* 7. mengutip (Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, h. 187).

membutuhkan waktu yang pendek.[28]Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas yang luas, pada sisi perekonomian Negara sangat menguntungkan karena akan menambah pendapatan Negara, sementara pada sisi lingkungan perlu mendapat perhatian yang serius, karena perluasan perkebunan ini akan memerlukan lahan yang tidak sedikit, apalagi jika pembukaan lahan perkebunan ini dilakukan dihutan alam ini yang menjadi masalah.

Sebab, diharapkan kedepan pembangunan lahan perkebunan dilaksanakan di lahan yang tidak produktif lagi, misalnya dibekas lahan yang telah ditinggalkan oleh pengusaha hutan, lahan bekas tambang batu bara, tambang nikel, tambang timah. Selain itu, pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat pula dilaksanakan di semak belukar, di lahan ilalang yang sangat luas di Indonesia. Oleh karena itu, dalam memacu dan memperluas kebun kelapa sawit ke depan, betul-betul pemerintah diharapkan memberikan izin pembukaan lahan perkebunan bukan lagi hutan alam, hutan produksi, tetapi di lahan yang tidak produktif.[29] Pembukaan lahan kelapa sawit merupakan kegiatan awal dalam rangka membudidayakan tanaman sawit.

Proses ini dilakukan mulai dari perencanaan tata letak dan ruang lahan hingga pembukaan hutan menjadi lahan. Dalam penerapannya, diperlukan upaya-upaya yang bersifat ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi area di sekitarnya. Tahap perencanaan tata letak lahan dan ruangannya dikerjakan melalui serangkaian penelitian untuk mengetahui sifat dan karakteristik lahan tersebut.Penelitian yang dimaksud meliputi topografi, iklim, tanah, status, air, jalan, dan penduduk. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan tentang kelayakan suatu lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

---

[28] Supradi, *Hukum kehutanan dan hukum perkebunan di indonesia(*Jakarta Timur:Sinar Grafika,2011) h,544

[29] *Ibid.*

I. Perkebunan Karet

Karet merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan bagi 16 juta KK petani, disamping sebagai sumber devisa kedua terbesar setelah kelapa sawit dan penyedia lapangan kerja juga sekaligus sebagai pemasok bahan baku berbagai industri karet dalam negeri. Sejumlah lokasi di indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk pertanaman karet. Ada tiga asas yang menjadi acuan dalam pembangunan yang mendasari kebijakan pembangunan dalam lingkungan ekonomi dan pembangunan nasional ,yaitu mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan nasional, memperluas lapangan kerja memelihara kekayaan dan kelestarian alam dan meningkatkan kesuburan sumberdaya alam.[30]

Dengan memperlihatkan adanya peningkatan permintaan dunia terhadap komoditi karet dimasa yang akan datang, maka upaya untuk menigkatkan pendapatan petani melalui perluasan tanaman karet dan peremajaan kebun bisa merupakan langkah yang efektif untuk dilaksanakan. Untuk mendukung hal ini, diperlukan diadakan bantuan yang bisa memberikan modal bagi petani atau pekebun swast untuk membiayai pembangunan kebun karet dan pemeliharaan tanaman secara intensif.

J. Peranan Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertanian dapat berkerja sama secara harmonis dengan sektor-sektor lain untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, mengurangi kemiskinan, dan melestarikan lingkungan. Dunia pertanian berkontribusi pada pembangunan sebagai sebuah aktivitas ekonomi, sehingga mata pencaharian dan

[30] Putri Wulandari,Alimudin Laapo, Dance Tangkesalu, *"Strategi Pengembangan Usaha Perkebunan Karet Di Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara",* Universitas Tadulako: Jurnal Agrotekbis 4, no.5 (2016), hal .664

sebagai cara untuk melestarikan lingkungan, sehingga menjadikan sektor ini sebuah instrument unik bagi pembangunan.

Sektor pertanian memiliki nilai komponen pertumbuhan regional terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya yang berarti sektor pertanian memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja. Dinamika peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi peran penting untuk senantiasa diperhatikan agar sektor pertanian dapat dikembangkan dan ditingkatkan perannya sesuai dengan potensinya. Untuk mengetahui dinamika peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, pertumbuhan PDRB sektor pertanian, basis dan tidaknya sektor pertanian berdasarkan analisis Location Quotion (LQ), serta klasifikasi sektor pertanian berdasarkan Tipologi Klasen.[31]

[31] Wiwit Rahayu dan Nuning Setyowati, *Dinamika Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Solo Raya*, Volume 31 No 1, 2016, hal. 1-2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research).*penelitian lapangan *(field research)* yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian.[32] Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan kejadian lapangan sesuai dengan data-data menyajikan data dan menganalis data serta menggambarkan permasalahan yang ada.

Tujuan untuk menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk menggambarkan sesuatu secara nyata dan apa adanya, sebagaimana dikemukakan oleh sukardi bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambakan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung melakukan observasi awal untuk mendapatkan gambaran tentang analisis peningkatan akses pendanaan lembaga keuangan syariah untuk petani dikenagarian empat koto pulau punjung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan syariah di kenagarian Empat Koto Pulau Punjung kabupaten dharmasraya waktu penelitian dilakukan pada bulan oktober 2022 sampai waktu yang diperlukan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

---

[32] Saiffudin Azwar,*Metode Penelitian,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2016), hlm. 21

1. Data primer.

   Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Dalam penelitian ini data primer berupa wawancara langsung dengan masyarakat petani dan karet di kenagarian empat koto pulau punjung kabupaten dharmasraya.

2. Data sekunder.

   Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari data dan arsip dari lembaga keuangan syariah di nagari empat koto pulau punjung yaitu pada bank BSI Kcp Pulau Punjung.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Jadi, apabila penelitian tentang analisis peningkatan akses pendanaan lembaga keuangan syariah terhadap sektor pertanian maka pertanian khusus nya perkebunan sawit dan karet merupakan sumber pendapatan masyarakat paling utama. Maka Penelitian ini mendapatkan informasi melalui wawancara yang dilakukan masyarakat petani sekitar 5 orang pada nagari empat koto pulau punjung kabupaten Dharmasraya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam observasi ini penulis akan mengamati bagaimana peningkatan akses

pendanaan lembaga keuangan syariah pada petani di kenagarian Empat Koto Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya di Bank BSI kcp Pulau Punjung dan masyarakat nagari Empat Koto.

2. Wawancara

   merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan narasumber. Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan masyarakat petani karet dan sawit di Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

3. Dokumentasi.

   Dokumentasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti sebagai suatu yang tertulis, tercetak, yang dapat dijadikan sebagai buku atau keterangan.

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sisitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan tangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[33]

Teknik data yang penulis gunakan adalah data kualitatif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Menurut Milles dan Huberman ada tiga teknik dalam analisa data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif yakni:

1. Reduksi Data

[33] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian,*(Jakarta: umi Aksara, 2015), hal.83

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan data berlangsung, peneliti telah menulis secara singkat yang akan dicari, menetukan tema serta membuat batasan-batasan permasalahan yang akan diteliti dan menulis memo.

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun guna memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap dat yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung pada penayajian data ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, bagan atau tabel.[34]

3. Verifikasi Data

Merupakan kegiatan pengambilan kesimpulan dari data yang di uji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokan agar mempunyai nilai valid terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

[34] Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hal. 98

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pulau Punjung

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 februari 2021 atau 19 jumadil akhir 1442 H Presiden joko widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di indonesia tersebut di istana negara BSI merupakan bank hasil merger antara PT bank Bri syariah Tbk, PT Bank syariah mandiri dan PT Bank BNI Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 januari 2021 melalui surat nomor SR-3 PB 1/2021 selanjutnya, pada 1 Februari 2021 Presiden Joko widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25% sisanya adalah pemegang saham masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam *(Rahmatan Lil ‘Aalamiin)*. Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok

bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

B. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

1. Sejarah Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.

Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka

Laporan Penyelenggaraan 59 Pemerintahan Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Aktifitas Pemerintahan telah dimulai sejak dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005[35]

1. Profil Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat , Indonesia. Pada kawasan ini dahulunya pernah berdiri sebuah kerajaan melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. kabupaten ini dibentuk berdasarkan undang-undang No. 38 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat. Merupakan pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijujunng. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo (Badan Statistik Kabupaten Dharmasraya 2016)

a. Kondisi Geografis[36]

Letak geografis kabupaten Dharmasraya

[35] Dharmasraya Dalam Angka 2014, diakses pada Kamis, 8 Juni 2023

[36] *Kabupaten Dharmasraya dalam angka 2016,* (Dharmasraya: BPS Kabupaten Dharmasraya), 2016, hal. 9

No.	Uraian	Keterangan
1.	Letak Geografis	0º47 07 LS- 1° 41 56 LS 101° 09 21 BT - 101° 54 27 BT
2.	Batas-Batas Daerah	
	Utara	Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi
	Selatan	Kabupaten Bungo dan Kerinci Provinsi Jambi
	Barat	Kabupaten Solok dan Solok Selatan
	Timur	Provinsi jambi
3.	Ketinggian dari permukaan laut	82 m – 1.525 m
4.	Luas Daerah	3023,25 Km
5.	Jumlah Sungai	59 buah
6.	Panjang Sungai	450.9 km
7.	Panjang Jalan	60.62 km

	Negara	
8.	Panjang jalan Provinsi	83.5 km
9.	Panjang Jalan Kabupaten	1035.72M

b. Pemerintahan

Secara administrasi, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan, 52 Nagari , dan 260 jorong sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Nagari dan Jorong di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Sungai Rumbai	5.106	4	24
2.	Koto Besar	56.057	5	22
3.	Asam Jujuhan	48.541	7	32
4.	Koto Baru	22.120	4	26
5.	Koto Salak	12.145	5	27

6.	Tiumang	13.443	4	17
7.	Padang Laweh	6.062	4	17
8.	Sitiung	12.145	4	22
9.	Timpeh	32.301	5	21
10.	Pulau Punjung	44.316	6	31
11.	1X Koto	50.050	4	21
Jumlah		**302.599**	**52**	**260**

Sumber data : rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023

Pada Tahun 2009 dikeluarkan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Dalam Perda tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan sehingga dari 48 nagari menjadi 52 nagari di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan jumlah jorong seluruhnya sebanyak 260 jorong. Dengan terbentuknya nagari, selanjutnya pembangunan yang dilaksanakan di Dharmasraya sudah tentu akan berbasis nagari. Jika ditunjang dengan semangatmembangun dari tingkat nagari maka aspirasi masyarakat akan lebih mudah untuk disalurkan melalui nagari.

Dari hasil pemekaran 11 kecamatan tahun 2009 berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2009 kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Koto Besar dengan luas 488,19 Km2 dan kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Sungai Rumbai 47,63 Km2.

A. Gambaran umum Kenagarian Empat Koto, Kec, Pulau Punjung Kab. Dharmasraya

1. Letak Geografis Kenagarian Empat Koto

Nagari empat koto merupakan salah satu Nagari atau Desa yang ada di kecamatan Pulau Punjung yang tepat nya berada di kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia. Batas-Batas wilayah Nagari Empat Koto adalah sebagai berikut:

Batas wilayah Nagari Empat Koto, Kecamatan Pulau Punjung,Kabupaten Dharmasraya

Utara	Nagari Gunung Selasih
Timur	Nagari Gunung Selasih dan Sungai Dareh
Selatan	Nagari Sungai Kambut dan Sungai Dareh
Barat	Nagari Sungai Kambut

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Empat Koto

Nagari Empat Koto adalah nagari berada di kecamatan pulau punjung tepatnya berada di ibu Kota Kabupaten Dharmasraya. Nagari empat koto berada di ibu kota kabupaten Dharmasraya 173,1 kilometer dari Ibu Kota Provinsi. Nagari Empat Koto memiliki luas 37,59 km2 dengan jumlah penduduk 10.742 Jiwa. Nagari Empat Koto terdiri atas 12 Jorong yaitu:

a. Jorong Kubang Panjang
b. Jorong pasar pulau punjung
c. Jorong pulau punjung
d. Jorong simpang poga
e. Jorong pikulan
f. Jorong taratak pulau punjung
g. Jorong Kubang Gajah Pulau Punjung

h. Jorong Tabek

i. Jorong Tanjung Limau

j. Jorong Padang Duri

k. Jorong Ranah Pulau Punjung

l. Jorong Bukik Sabolah

2. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Empat Koto

a) Pendidikan

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada pendidikannya karena pendidikan dan pengajaran suatu yang sangat besar manfaatnya dalam mencapai kemajuan pembangunan. Merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi terwujudnya manusia-manusia pembangunan yang berkualitas serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Salah satu faktor utama penyebab lajunya pendidikan terhadap anak yaitu adanya dorongan serta motivasi dari orang tua untuk anak minimal menamatkan SLTA namun di samping itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi orang tua mulai terbentur dengan masalah biaya atau dana.

Ada juga sebagian anak yang melanjutkan ke tingkat yang lebuh tinggi dan memperoleh gelar sarjana hanya dalam jumlah yang sedikit.

Adapun data yang penulis dapat bahwa sarana pendidikan yang ada di Kenagarian Empat Koto dapat dilihat pada tabel berikut :

Sarana Pendidikan Kengarian Empat Koto

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah

1.	SD	5
2.	SLTP	1
3.	SLTA	1
4.	MADRASAH	2

Sumber data: Kantor Wali Nagari Empat Koto[37]

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa sarana pendidikan di Nagari Empat Koto sudah bisa dikatakan cukup memadai mulai adanya sekolah dasar sampai sekolah menengah atas tetapi di nagari empat koto masih memerlukan sekolah TK untuk anak usia dini agar orang tuanya tidak jauh menyekolahkan anak nya ke luar nagari tersebut. Di nagari empat koto sistem pendidikan serta pekembangannya sudah hampir berjalan dengan baik walaupun masih dengan keterbatasannya.

b) Kehidupan beragama

Agama merupakan pedoman hidup yang sangat penting bagi manusia. Dengan adanya pedoman hidup maka akan membuat manusia menjadi tentram, damai, tabah dan tawakal, ulet serta percaya diri, berani berjuang untuk menegakkan kebenaran, kesiapan mengabdi dan berkorban. Tanpa agama manusia akan terombang ambing dalam kehidupan tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sarana yang dapat digunkan sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang keagamaan sebagai penuntun hidup di didunia dan akhirat dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan.

Sedangkan wadah pendidikan keagamaan yang terdapat di Kenagarian Empat Koto adalah TPA/ TPSA. Penduduk di Kenagarian Panampuang seluruhnya beragama Islam, kebanyakan mereka taat menjalankan ibadahnya, walaupun sebagian dari penduduk Kenagarian Empat Koto masih ada yang menjalankan agama

[37] Sumber Data Kantor Wali Nagari Empat Koto

sebagai rutinitas saja tanpa mengetahui apakah yang diamalkan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Disetiap masjid dan mushalla biasanya diadakan shalat berjamaah pada siang atau malam hari.

Kegiatan keagamaan di Kenagarian Empat Koto terlihat cukup baik. Ini dapat dilihat dari banyak sisi terutama sekali pada bulan Suci Ramadhan. Masyarakat melakukan shalat berjamaah di masjid atau mushalla serta tadarus sehabis shalat witir. Juga dapat dilihat ketika menyambut hari besar Islam. Sarana peribadatan yang ada di Kenagarian Empat Koto cukup baik untuk memenuhi kebutuhan ritual masyarakat dalam pengabdian mereka kepada Allah SWT. Suatu yang sangat disayangkan adalah masyarakat memfungsikan masjid dan mushalla secara maksimal hanya pada bulan Ramadhan.

Sehabis bulan Ramadhan masjid dan mushalla itu kurang difungsikan lagi maksudnya masyarakat kebanyakan hanya melakukan shalat dirumah saja, sedangkan kegiatan yang terus berjalan hanyalah TPA/ TPSA.

3. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat di Kenagarian Empat Koto

a) Sosial Ekonomi Masyarakat

Dilihat dari kondisi wilayah baik secara fisiografis maupun sosiografis, penduduk yang bermukim di Kenagarian Empat Koto mempunyai mata pencarian yang bermacam-macam, tetapi pada umumnya penduduk Kenagarian Empat Koto bermata pencarian sebagai petani, berkebun, pemotong karet dan ada juga yang berdagang dan lain sebagainya. Penduduk Kenagarian Empat Koto ini memiliki sumber Penghasilan sebagai pertanian dan perkebunan karena Kenagarian Empat Koto ini berada di lingkungan alam yang memungkinkan penduduk setempat untuk bertani dan berkebun.

b) Adat Istiadat Kenagarian Empat koto

> Adat adalah tata cara hidup untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia baik itu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok, karena adat itu syara', syara' basandi *kitabullah,* maka adat pun ikut mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi dengan demikian adat istiadat merupakan prilaku yang telah menjadi kebiasaan sekaligus menjadi peraturan bagi masyarakat seperti kelompok adat Nagari.

Mengenai adat istiadat di Kenagarian Empat Koto masyarakat tunduk dan taat pada hukum atau aturan adat yang berlaku. Berbicara menganai adat istiadat di Kenagarian Empat Koto secara singkat dapat dikemukan bahwa masyarakat setempat seluruhnya keturunan orang Minangkabau yaitu menurut garis keturunan ibu (matrilineal).

Adapun adat istiadat di kenagarian Empat Koto dalam hal pernikahan, penulis akan menguraikan secara ringkas yaitu tahap pertama perkenalan antara keluarga atau proses pendekatan antara keluarga dimana tujuannya untuk saling mengenal lebih jauh, jika telah terjadi kecocokan di antara kedua belah pihak maka ditetapkan hari pertunangan. Ketika acara pertunangan ditetapkanlah kapan dilaksanakanya akad nikah dan peresmian atau pesta kawin.

Dikenagarian Empat Koto dikenal juga degan adanya ninik mamak sebagai pemangku adat " *tak lakang di paneh tak lapuak dek hujan*", memakai cara-cara sebagaimana ninik mamak yang memakai alur dan patut serta malu dan sopan santun. Adapun yang menjadi pucuk adat di Nagari Empat Koto adalah seorang yang bergelar datuak rajo pangulu. peran niniak mamak dalam kehidupan masyarakat mamak sebagai pemangku adat sejalan dengan agama seperti yang disebutkan bahwa "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* ".

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu dari kedudukan ke empat Ninik Mamak di atas yaitu:

a) Datuk

Datuk adalah orang yang ditinggikan selangkah dalam jajaran ninik mamak. Biasanya datuk ini bergelar Datuk Rajo Pangulu.

b) Imam

Imam adalah seorang yang mendampingi atau membantu datuk dalam menjalankan adat seperti gelar yang diberikan imam maka imam lebih banyak tugasnya pada semua yang bersangkutan dengan syara'. Contohnya menjadi imam di mesjid atau surau memberikan doa ketika kemenakan meminta doa.

c) Khotik

Khotik juga salah seorang pembantu datuk. Adapun tugasnya seperti yang di ungkapkan : cadiak pandai dalam kampuang. Artinya khotik lebih banyak membidangi urusan dalam bidang tabligh atau khotik merupakan penghubung dalam menyelesaikan suatu urusan. Jadi khotik adalah orang yang tugasnya menjadi penghubung atau menyampaikan atau orang yang memberitahukan sesuatu misalnya memberikan adanya orang yang meninggal dunia.

Adapun tata cara pengangkatan datuk, imam, khotik ini adalah:

c) Mengadakan Musyawarah

Biasanya didalam setiap kampung pada umumnya ada 4 kaum yang dikenal dengan istilah 4 mamak tuo adalah orang yang dituakan di dalam suatu kaum. Setiap kaum mengadakan musyawarah untuk memilih siapa yang akan diangkat untuk menjadi ninik mamak, karena biasanya dalam satu kampung itu

ada 4 kaum maka masing-masing kaum hanya memunculkan satu orang saja untuk menjadi ninik mamak.

Adapun gelar yang akan di pangku oleh para ninik mamak ini biasanya di ganti-gntikan (balega). Artinya jika suatu kaum telah memegang gelar Datuk berarti untuk berikutnya dia tidak memegang gelar Datuk lagi tetapi yang lain seperti Imam dan lain-lain. Adapun lama waktu menjadi Datuk atau yang lainnya tidak ada batas.

Setelah didapatkan calon dari masing-masing kaum maka diadakanlah musyawarah untuk: peresmian pada kauum masing-masing dan membicarakan tata cara pengangkatan (peresmian dalam kampung).

d) Peresmian Ninik Mamak

Acara peresmian atau penobatan ini diundang atau dihadirkan semua warga kampung. Sedangkan biaya untuk penobatan ini biasanya di tanggung oleh kampung sesuai dengan kesepakatan masing-masing anatara kaum. Adapun pakaian Datuk dalam peresmian ini memakai celana hitam, baju kemeja putih dilengkapi dengan jas hitam, memakai kain serong, keris, dan saluak. Saluak ini di pakai pada waktu penobatan yang di pasangkan oleh salah seorang mamak tuo yang di sepakati oleh semua kaum.

Sedangkan Imam, khotik, Labai memakai celana hitam, baju kemeja putih lengkap dengan jas hitam, kain serong dan peci. Pada acara penobatan ini dihadiri oleh pucuk Adat Nagari Panampuang,Induak Nan Barampek, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan semua orang kampung.

B. Analisis Peningkatan Akses Pendanaan Lembaga keuangan Syariah Untuk Petani di Nagari Empat Koto

Masyarakat kabupaten Dharmasraya di kecamatan pulau punjung khususnya pada kenagarian Empat koto pulau Punjung sebagian besar masyarakat nya bermata pencarian sebagai petani dan ada juga berternak, berdagang dan lainnya. Akan tetapi mayoritasnya bertani baik itu mengelolah kebun karet dan kebun kelapa sawit. Di kenagarian Empat Koto perekonomian masyarakat petani masih belum bisa dibilang sejahterah salah satu faktornya adalah kurangnya akses permodalan untuk usaha pertanian dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta kurangnya pengetahuan petani terhadap lembaga keuangan syariah. Pada saat ini permasalahan utama yang di hadapi masyarakat yaitu kurang permodalan dalam usaha petani dan pelaku usaha perbankan pendukung pembiayaan petani. Dan penyaluran kredit masih sedikit pada sektor pertanian dikarenakan beberapa permasalahan salah satunya akses yang terbatas antara petani dan lembaga keuangan syariah pendapatan petani yang tidak menentu dan bisa menyebabkan kemacetan kredit apabila terjadi gagal panen atau factor cuaca dan tidak adanya agunan yg jelas dimiliki oleh petani dan lainnya. Jumlah penduduk di kenagarian empat koto pulau punjung sekarang hampir mencapai 10.742 jiwa dengan luas nagari 37,59 km2 atau setara dengan 3.759 H yang terbagi dalam 12 jorong.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Di Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung tahun 2018-2022.

Tahun	Jumlah penduduk	Kenaikan / penurunan	
		∑	%
2018	10.444	-	-

2019	10.592	148	(1,41)
2020	10.688	96	0,90
2021	10.628	(60)	(0,56)
2022	10.742	114	1,07

Sumber: Arsip Dokumen Di Nagari Empat Koto

Dari tabel diatas jumlah kepadatan penduduk mencapai 10.742 jiwa pada tahun 2022 dari 12 jorong di kenagarian empat koto pulau punjung. pada tahun 2018 jumlah penduduk kenagarian empat koto pulau punjung berjumlah 10.444 penduduk, pada tahun 2019 jumlah penduduk 10.592 mengalami kenaikan 1,42% yaitu 141 jiwa, tahun 2020 berjumlah 10.688 mengalami penurunan sebanyak 0,90% atau 96 penduduk dari tahun sebelumnya, tahun 2021 berjumlah 10.628 mengalami penurunan lagi 0,56% yaitu 60 jiwa, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan 1,07% yaitu 114 jiwa.

Tabel 4.3

jumlah petani karet dan sawit pada kenagarian Empat Koto Pulau Punjung pada tahun 2018- 2022

Tahun	**Jumlah Petani Sawit dan Karet**	**Kenaikan / Penurunan**	
		∑	**%**
2018	3.770	-	-

2019	3.816	46	1,22
2020	3.874	58	1,51
2021	3.926	52	1,34
2022	3.990	64	1,63
Rata-rata Pertumbuhan pertahun			1,43 %

Sumber: Arsip dokumen nagari empat koto

Dari tabel diatas bisa dilihat jumlah petani sawit dan karet di kenagarian empat koto pulau punjung mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. tahun 2018 petani sawit dan karet berjumlah 3.770 petani, pada tahun 2019 petani sawit dan karet mengalami peningkatan 1,22% yaitu 46 petani, tahun 2020 meningkat 1,51% yaitu 58 petani, tahun 2021 petani sawit dan karet menurun menjadi 1,34% yaitu 52 petani, pada tahun 2022 petani sawit dan karet meningkat 1,63% yaitu 64 petani. Rata pertumbuhan jumlah petani sawit dan karet adalah 1,43 % pertahun.

Tabel 4.4

Perbandingan Jumlah Petani Sawit dan Karet dengan Jumlah Penduduk di Tahun 2018-2022 pada Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung.

Tahun	**Jumlah petani sawit dan karet**	**Jumlah Penduduk**	**%**
2018	3.770	10.444	36,09
2019	3.816	10.592	36,02

2020	3.874	10.688	36,24
2021	3.926	10.628	36,94
2022	3.990	10.742	37,14

Sumber: arsip dokumen nagari empat koto

Tabel diatas adalah persen perbandingan jumlah petani sawit dan karet dengan jumlah penduduk dari tahun 2018-2022. Tahun 2019 yaitu 36,09%, tahun 2019 perbandingan 36,02%, tahun 2020 yaitu 36,24%, pada tahun 2021 yaitu sebanyak 36,94% dan pada tahun 2022 perbandingan sebesar 37,17%.

Di kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terdapat satu Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang letaknya cukup strategis di jalan lintas sumatera di samping Rsud Pulau punjung Dharmasraya.Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis tentang akses pendanaan pada Bank BSI KCP Pulau Punjung dan masyarakat di Nagari Empat Koto Yang melakukan Pembiayaan di Bank tersebut.

Tabel 4.5

Jumlah dana KUR Pertanian yang di alokasi kan oleh Bank BSI ke petani Nagari Empat Koto

Tahun	Jumlah Dana	Naik /Turun	
		∑	%
2028	(x)		
2019	(x)		
2020	(x)		

2021	3.675,000,000		
2022	4.330,000,000	655.000,000	17,82

Sumber: PT Bank Bsi Kcp Pulau Punjung

(x) data tidak tersedia

Bank bsi kcp pulau punjung mulai beroperasi atau berdiri pada februari tahun 2021,maka dari penulis hanya meneliti dari tahun 2021 hinggah 2022, bisa dilihat dari tabel diatas dana yang dikucurkan bank BSI pada tahun 2021 sebesar 3.675,000,000 dan pada tahun 2022 sebesar 4.330,000,000 pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah dana untuk petani karet dan sawit di nagari empat koto pulau punjung sebanyak 655.000,000 atau skitar 17,82%, di BSI tersebut terdapat pembiyaan KUR yang memang di sediakan khusus untuk petani menengah kebawah yang pembiayaan nya mulai dari 10 juta hingga 500 juta, itupun tergantung dengan pendapat nasabah dan usaha yang di jalani nasabah dan juga agunan yang di berikan nasabah kepada pihak bank,jika usaha dan jaminannya memadai maka pihak bank akan memberikan pembiayaan lebih tinggi tetapi jika tidak maka pihak bank akan memberi sesuai dengan kemampuan atau pendapat yang di miliki nasabah tersebut.

Tabel 4.6

Jumlah Petani Yang Menerima Dana KUR Pertanian Di Bank BSI

Tahun	**Jumlah Petani**	**Kenaikan /Penurunan**	
		∑	**%**
2018	(x)		
2019	(x)		

2020	(x)		
2021	68		
2022	85	17	0,25%

Sumber data: PT Bank BSI kcp Pulau Punjung (x)
data tidak tersedia

Jumlah petani sawit dan karet yang menerima dana dari Bank BSI juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 sebanyak 17 orang.

Tabel 4.7

Rata-Rata Jumlah Petani Nagari Empat Koto Yang Menerima Dana KUR Pertanian Di Bank BSI Kcp Pulau Punjung Tahun 2018-2022

Tahun	Dana	Petani	Rata-rata
2018	(x)	(x)	
2019	(x)	(x)	
2020	(x)	(x)	
2021	3.675,000,000	68	54.044.117,65
2022	4.330,000,000	85	50.941,176,47

Sumber data: PT Bank BSI kcp Pulau Punjung
(x) sumber data belum tersedia

Dari tabel diatas maka diketahui jumlah rata-rata petani yang menerima dana KUR adalah pada tahun 2021 sebanyak 68 dana rata-rata yang di alokasikan ke petani 54.044.117,65 kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 17 orang jadi petani yang menerima dana KUR di BSI menjadi 85 orang petani dan rata-rata dana yang di alokasikan ke petani menurun dari tahun sebelum nya yaitu pada tahun 2022 sebesar 50.941,176,47 per petani.

Tabel 4.8

Luas Lahan Pertanian Sawit dan Karet Nagari Empat Koto Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Lahan Sawit	Luas Lahan Karet	Total
2018	561,5 ha	701,01 ha	1.262,51 ha
2019	570,83 ha	742,00 ha	1.312,83
2020	590,83 ha	773,00 ha	1.363,83
2021	600,83 ha	801,00 ha	1.401,83
2022	608,66 ha	821, 00 ha	1.429,66

Sumber data: Bps Kabupaten Dharmasraya tahun 2022

Dari tabel di atas bisa kita lihat luas perkebunan karet dan sawit dari tahun 2018 sampai dengan 2022,pada tahun 2018 luas perkebunan karet adalah 701,01 ha,dan luas perkebunan sawit 561,5 ha, pada tahun 2019 luas perkebunan karet bertambah 9,33 ha, luas perkebunan sawit bertambah 9,33 ha, pada tahun 2020 luas kebun karet bertambah 31 ha, kebun sawit bertambah 20 ha, tahun 2021 kebun karet bertambah 28 ha dan kebun sawit bertambah 10 ha, dan terkahir pada tahun 2022 luas kebun karet bertambah 20 ha jadi luasnya 821,00 ha, dan kebun sawit bertambah 7,83 ha jadi luasnya 608,66 ha.

penelitian yang dilakukan di lembaga keuangan syariah di Kenagarian Empat Koto mengenai akses pendanaan untuk petani maka penulis melakukan wawancara pada 5 orang petani sawit dan karet yang mendapatkan dana dari Bank BSI di Nagari Empat Koto. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan yang pertama pada bapak andri sebagai petani sawit.

Menurut bapak andri selaku petani kebun sawit beliau memiliki kebun sawit sekitar 5 hektar biaya operasionalnya seperti merawat dan memupuknya kurang lebih 15 juta pertahun, sebelum mendapatkan pembiayaan pada perbankan syariah beliau mendapatkan dana dari perbankan konvensioanal setelah adanya bank BSI beliau memilih untuk mencoba menggunakan bank BSI untuk mendapatkan dana karena menurutnya sistem bungan (riba) cukup memberatkannya .[38]

Wawancara kedua dengan bapak anto selaku petani kebun sawit beliau memiliki kebun sawit sekitar 6 hektar dan modal yang di butuhkan mulai dari menanam merawat dan memupuknya kurang lebih 18 juta per tahun, sebelum mendapatkan pembiayaan pada bank syariah beliau mendapatkan dana pada perbankan konvensional .[39]

Wawancara ketiga dengan bapak Suhai Petani karet di Nagari Empat Koto beliau mengatakan bahwa beliau memilki kebun karet seluas 3 hektar dan dana yang dikeluarkan oleh bapak suhai mulai dari memupuk sampai dengan merawatnya kurang lebih 8,5 juta pertahun.[40]

Wawancara keempat dengan bapak lukman petani karet di Nagari Empat koto beliau mengatakan bahwa beliau memiliki kebun karet seluas 5 hektar modal yang di keluarkan dari merawat hingga memupuknya 12 juta per tahun.[41]

Wawanacara kelima dengan bapak Hendri petani sawit di Nagari Empat Koto, bapak Hendri mengatakan luas kebun sawit yang dimilikinya kurang lebih 6 sampai 7 hektar modal yang di keluarkan nya mulai dari merawat sampai mempuk dan lain-lain adalah 21 juta.[42]

Tabel 4.9

[38] Wawancara dengan bapak andri,pada tanggal 10 juni 2023
[39] Wawanacara Dengan Bapak Anto, Tanggal 10 Juni 2023
[40] Wawancara Dengan Bapak Suhai, Tanggal 10 Juni 2023
[41] Wawancara Dengan Bapak Lukman, Tanggal 10 Juni 2023
[42] Wawancara Dengan Bapak Hendri, Tanggal 10 Juni 2023

Rata-Rata Kebutuhan Dana Untuk Usaha Pertanian (Karet Dan Sawit) Di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

No	Responden	Luas Lahan (Ha)	Kebutuhan Dana (Rp 000)
1.	Andri	5	15.000
2.	Anto	6	18.000
3.	Suhai	3	8.500
4.	Lukman	5	12.000
5.	Hendri	7	21.000
Total		26	74.500
Rata-Rata			2.865,38

Sumber: Data diatas

Berdasarkan data pada tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa Rata-rata kebutuhan dana per petani (karet dan sawit) pertahun adalah sebesar Rp 2.865,38 dengan demikian dapat di hitung jumlah kebutuhan dana selama tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 4.10

Kebutuhan Dana Untuk Usaha Pertanian Di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Lahan	Biaya Rata-rata	Jumlah

	(Ha)	Per Ha (000)	(Rp 000)
2018	1.262,51	2.865,38	3.617.570,90
2019	1.312,83	2.865,38	3.761.756,83
2020	1.363,83	2.865,38	3.907.891,21
2021	1.401,83	2.865,38	4.016.775,65
2022	1.429,66	2.865,38	4.096.519,17

Sumber: data di atas

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kebutuhan dana untuk usaha pertanian di nagari empat koto pulau punjung kabupaten dharmasraya pada tahun 2018-2022 pada tahun 2018 luas lahan 1.262,51 biaya Rata-rat per Ha 2.865,38 jumlah nya 3.617.570,90, tahun 2019 luas lahan 1.312,83 biaya Rata-rata 2.865,38 jumlah nya 3.761.756,83, tahun 2020 luas lahan 1.401,83 biaya Rata-rata 2.865,38 jumlah nya 3.907.891,21, tahun 2021 luas lahan 1.401,83 biaya Rata-rata 2.865,38 jumlah 4.016.775,65, dan pada tahun 2022 luas lahan 1.429,66 biaya Rata-rata 2.865,38 jumlahnya 4.096.519,17.

Tabel 4.11

Kekurangan Dan Kelebihan Dana Untuk Usaha Pertanian (Karet Dan Sawit) Di Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Tahun	Kebutuhan Dana (Rp 000)	Alokasi Dana (000)	Kekurangan / keebihan Dana
2018	3.617.570,90	-	(3.617.570,90)

2019	3.761.756,83	-	(3.761.756,83)
2020	3.907.891,21	-	(3.907.891,21)
2021	4.016.775,65	3.675.000	(341.775,65)
2022	4.096.519,17	4.330.000	233.480,83

Sumber: data dianalisis sendiri

Berdasarkan tabel di atas kekurangan dan kelebihan dana untuk usaha pertanian (karet dan sawit) di Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2018 kebutuhan dana untuk pertanian sebesar 3.617.570,90 alokasi dana belum tersedia oleh perbankan syariah karena bank syariah indonesia BSI Kcp Pulau punjung baru mulai beroperasi pada tahun 2021 maka kekurangan dana (3.617.570,90) , tahun 2019 kebutuhan dana 3.761.756,83 kekurangan dana (3.761.756,83), tahun 2020 kebutuhan dana 3.907.891,21 kekurangan dana (3.907.891,21), tahun 2021 kebutuhan dana 4.016.775,65 alokasi dana 3.675.000 kekurangan dana (341.775,65) dan pada 2022 kebutuhan dana 4.096.519,17 alokasi dana 4.330.000 kelebihan dana 233.48,83.

Tabel 4.12

Kebutuhan Dana Untuk Usaha Pertanian (Karet Dan Sawit) Di Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Tahun	**Kebutuhan Dana**	**X**	**XY**	**X^2**
2018	3.617.570,90	-2	-7.235.141,80	4
2019	3.761.756,83	-1	-3.761.756,83	1
2020	3.907.891,21	0	0	0
2021	4.016.775,65	1	4.016.775,65	1
2022	4.096.519,17	2	8.193.038,34	4
Total	19.400.513,76		1.212.915,36	10

Sumber: Data di analisis sendiri

Berdasarkan tabel diatas yaitu kelebihan dan kekurangan dana untuk usaha pertanian (karet dan sawit) di Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018-2022.

Tabel 4.13

Prediksi Kebutuhan Dana Untuk Usaha Pertanian (Karet Dan Sawit) Di Kenagarian

Tahun 2023-20217

Tahun	Kebutuhan Dana (Rp 000)
2023	4.243.977,37
2024	4.365.268,91
2025	4.486.560,45
2026	4.607.851,99
2027	4.729.143,53

Sumber: data di analisis sendiri

Berdasarkan tabel prediksi kebutuhan dana untuk usaha pertanian di Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya maka penulis menganalisis sendiri. Penulis mendapatkan prediksi kebutuhan dana pada tahun 2023 sebesar 4.243.977,37, tahun 2024 meningkat yaitu 4.365.268,91, tahun 2025 meningkat 4.486.5660,45, tahun 2026 meningkat 4.607.851,99, dan pada tahun 2027 meningkat lagi sebesar 4.729.143,5. Dilihat dari data di atas bisa di analisis bahwa kebutuhan dana untuk usaha pertanian setiap tahun selalu meningkat maka dari itu peran lembaga keuangan syariah sangat di perlukan untuk bisa mencukupi atau memfasilitasi kebutuhan dana untuk petani di Nagari Empat Koto Pulau Punjung Dharmasraya.

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah adalah suatu sistem yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam tentunya bank syariah kcp pulau punjung telah memenuhi pelaksanaannya berdasarkan hukum islam. Dalam sistem pelaksanaanya perbankan syariah, adanya larangan dalam agama islam untuk memberikan pembiayaan atau memungut pembiayaan dengan menuggunakan bunga (Riba). Dengan adanya perbankan syariah ini maka masyarakat akan terhindar dari yang namanya Riba,Maisir dan Ghoror.

Masyarakat kabupaten Dharmasraya di kecamatan pulau punjung khususnya pada kenagarian Empat koto pulau Punjung sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan ada juga berternak, berdagang dan lainnya. Akan tetapi mayoritasnya bertani baik itu mengelolah kebun karet dan kebun kelapa sawit. Di kenagarian Empat Koto perekonomian masyarakat petani masih belum bisa dibilang sejahterah salah satu faktornya adalah kurangnya akses permodalan untuk usaha pertanian dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta kurangnya pengetahuan petani terhadap lembaga keuangan syariah.

Petani umumnya mulai membuka lahan perkebunan harus memiliki dana yang cukup karena mulai dari membuka lahan dan merawatnya hingga menghasilkan tidak lah membutuhkan dana yang sedikit maka dari itu para petani sangat mengaharapkan pembiayaan yang lebih memadai untuk sektor pertanian ini khususnya lembaga keunangan syariah karena mereka berpendapat bahwa melakukan pembiayaan ke bank syariah lebih meringankan mereka dari pada melakukan pembiyaan ke perbankan konvensional karena bunga yang cukup besar membuat mereka sedikit susah untuk mengembalikannya maka dari itu peran Bank Syariah Indonesia kcp pulau punjung sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan aksesnya ke petani

menegah kebawah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah.

Dari analisa penulis mengenai kurangnya akses pendanaan perbankan syariah ke sektor pertanian di nagari empat koto pulau punjung maka strategi yang cocok diterapkan dalam meningkatkan akses pendanaan untuk petani di kenagarian Empat Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya kedepannya adalah dengan memberikan pembiayaan lebih besar kepada usaha pertanian agar bisa mencukupi kebutuhan usaha petani menengah kebawah atau meningkatkan Plafon pembiayaan, memberikan pembiayaan yang sesuai dengan penghasilan petani, Meningkatkan akses ke petani dengan cara mempermudah proses dalam memberikan pembiayaan dan menyederhanakan atau mempermudah persyaratan untuk nasabah dalam mengajukan pembiayaan, mencari jalan keluar jika terjadi masalah mengenai angunan nasabah saat mengajukan pembiayaan pada bank syariah, juga lebih meningkatkan pemasaran produk pembiayaan pada petani di nagari Empat Koto yang belum terlalu paham mengenai pembiyaan syariah dan petani juga harus meningkatkan upaya dalam mengelolah usahanya dan meningkatkan produktivitasnya agar perbankan syariah lebih percaya dan mempermudah memberi pinjaman yang memadai untuk perkembangan usaha petani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dari lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses pendanaan atau pembiayaan pada sektor pertanian khusunya pada petani karet dan sawit di kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Karena di Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung masyarakatnya mendominan bermata pencarian sebagai petani sawit dan karet.
2. Masalah utama yang dihadapi masyarakat petani sawit dan karet adalah kurang permodalan dalam usaha petani dan pelaku usaha perbankan pendukung pembiayaan petani Dan penyaluran kredit masih sedikit pada sektor pertanian dikarenakan beberapa permasalahan salah satunya pendapatan petani yang tidak menentu dan bisa menyebabkan kemacetan kredit apabila terjadi gagal panen atau factor cuaca dan tidak adanya agunan yg jelas dimiliki.
3. Peran dari perbankan syariah adalah dengan meningkatkan akses pendanaan dan kepercayaannya pada petani agar petani bisa lebih maju dan berkembang melalui usaha yang di lakukannya.

B. Saran

1. Bank syariah seharusnya memberikan pembiayaan lebih besar kepada usaha pertanian agar bisa mencukupi kebutuhan usaha petani menengah kebawah atau meningkatkan Plafon pembiayaan.
2. Meningkatkan akses ke petani dengan cara mempermudah proses dalam memberikan pembiayaan, dan menyederhanakan atau mempermudah persyaratan untuk nasabah dalam mengajukan pembiayaan, mencari jalan keluar jika terjadi masalah mengenai angunan nasabah saat mengajukan pembiayaan pada bank

syariah, juga lebih meningkatkan pemasaran produk pembiayaan pada petani di nagari Empat Koto yang belum terlalu paham mengenai pembiayaan syariah.

3. Petani di Nagari Empat Koto juga harus meningkatkan upaya dalam mengelolah usahanya dan meningkatkan produktivitasnya agar perbankan syariah lebih percaya dan mempermudah memberi pinjaman yang memadai untuk perkembangan usaha petani.

DAFTAR PUSTAKA

Nadziroh Nurun Mi'rojun "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi." Jurnal Ekonomi 02 No. 2 (2020) : 55.

Farma Junia "Prospek Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian." Jurnal Ekonomi 5 No. 2 (2018)

Anita Dkk " Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aksesbilitas Umkm Terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum Syariah (Studi Di Kecamatan Pamijahan Bogor, Kabupaten Bogor)." Jurnal Ekonomi 1 No. 5 (2021) : 48

Rivai Veithzal Dan Arifin Arviyan. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi.* Jakarta : Pt Bumi Aksara.

Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: .

Ali Zaenudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhamad (Ed). 2006. *Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisi.

Asnaini, Herlina . 2017. *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta :Pustaka Belajar.

Ratag P.D. Julio Dkk " Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Minahasa Selatan." Jurnal Ekonomi Iix No. 2 (2016) H: 2

Undang-Undang Ri Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Ayat 8.

Todaro P. Michael And Smith C Stephen. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jild 2*. Jakarta:Pt Gelora Aksara Pratama.

Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.

Arsyad Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi V*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

Tambunan T.H Tulus. 1997. *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Departemen Agama Ri, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid* ., H. 140.

Mengutip "Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla", H. 61.

Mengutip "Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla" ,H. 187.

Supradi .2011. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Wulandari Dkk." Strategi Pengembangan Usaha Perkebunan Karet Di Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara". Jurnal Agrotekbis 4 No. 5 (2016). Hal. 664

Rahayu Wiwit Dan Setyowati Nuning." Dinamika Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Solo Raya". 31 No. 1 (2016). Hal 1-2.

Narbuko Cholid Dan Achmadi Abu.2015. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Umi Aksara

Bugin Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.

Wawanacara Dengan Bapak Andri, Tanggal 10 Juni 2023

Wawanacara Dengan Bapak Anto, Tanggal 10 Juni 2023

Wawancara Dengan Bapak Suhai, Tanggal 10 Juni 2023

Wawancara Dengan Bapak Lukman, Tanggal 10 Juni 2023

Wawancara Dengan Bapak Hendri, Tanggal 10 Juni 2023

.

LAMPIRAN

KISI-KISI WAWANCARA

A. Masyarakat nagari Empat Koto Yang Melakukan Pembiayaan pada Bank BSI KCP Pulau Punjung.
   1. Membahas mengenai luas lahan dan pengeluaran dana yang dikeluarkan untuk merawat kebun yang dimiliki oleh petani.
   2. Membahas mengenai pemahaman petani pada perbankan syariah
   3. Membahas dimana petani mendapatkan pembiayaan sebelum adanya Bank BSI KCP Pulau Punjung Dikenagarian Empat Koto Pulau Punjung.

B. Dokumentasi

